

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pahala Taman Pondok Jati pada 29 September 2025 sampai dengan 01 November 2025, hasil kesimpulan yang bisa diperoleh:

1. Kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pahala Taman Pondok Jati yang merupakan apotek pusat dari 7 cabang Apotek Pahala dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk peran dan fungsi calon Apoteker dalam proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, pemusnahan, serta pelayanan resep dan swamedikasi dalam pelayanan kefarmasian.
2. Kegiatan PKPA ini memberikan kesempatan untuk menerapkan ketrampilan dan mendapatkan pengalaman praktis bagi calon Apoteker baik secara manajerial maupun dalam pelayanan farmasi klinik, yang menekankan akurasi dan keterampilan manajerial dalam mengelola sumber daya di apotek.
3. Kegiatan PKPA ini dapat menjadi sarana pengembangan diri bagi calon Apoteker dengan dilandasi nilai-nilai PEKA (Peduli, Komit, dan Antusias) serta membangun keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien maupun rekan sejawat dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melayani pasien.
4. Pelaksanaan PKPA di Apotek Pahala memberikan pemahaman

mengenai strategi pendirian dan pengelolaan apotek, sehingga mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki ke dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, mandiri, dan kompeten.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah pelaksanaan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya sebelum melaksanakan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA), agar dapat lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek dan lebih efektif dalam berkomunikasi dengan pasien maupun rekan sejawat.
2. Mahasiswa calon apoteker harus selalu belajar, memahami serta *update* mengenai pembaruan peraturan dan Undang- undang kefarmasian yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2012, Drug Information Handbook with Interna
- BNF, 2022. British National Formulary 83th Edition, BMJ Publishing Group, Londontional Trade Names Index 21th edition, Ohio: Lexicomp.
- BNF for Children, 2022. BNF for Children September 2022-2023. BMJ. Groupand The Royal Pharmaceutical Society : London
- Departemen Kesehatan RI. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- McEvoy, G. K. 2011, *AHFS: Drug Information Essentials*, Bethesda: American Society of Health System Pharmacists.
- MIMS Indonesia. 2025. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 15, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin praktik, dan Izin kerja tenaga kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan nomor 889/MENKES/PER/V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin praktik, dan Izin kerja tenaga kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

- Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2024 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor, Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sweetman, S.C. 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed, Pharmaceutical Press, Chicago.